

Desentralisasi Penyediaan Program Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia: *Systematic Literature Review*

Septi Wulandari¹, Suprapti², Drajat Tri Kartono^{3*}

1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret.

*)Korespondensi: drajattri@staff.uns.ac.id

Abstract

The Indonesian government implements inclusive education in order to help people with disabilities from an early age adapt to their environment. Educated adults with disabilities are expected to be able to meet their needs independently and actively participate in society. The aim of this research is to ascertain whether inclusive education can replace special schools and how well these services serve the needs of students with disabilities. This research is expected to be a tool for policy makers to evaluate existing inclusive education. This study aims to analyze whether special education at present still needs to be maintained with an increase in the implementation of inclusive education programs in Indonesia. The research method is a systematic literature review with PRISMA. The results showed that there was an unpreparedness of the government and educational institutions in accommodating the needs of children with disabilities. On the other hand, the community still needs education in accepting the presence of children with disabilities to coexist with common children. In general, special education is still needed as an initial facility to prepare children with disabilities before taking education in inclusive schools and centers for the development of children with disabilities. Research recommendations that can be carried out in the future are by connecting the variables of decentralization and inclusive education with other variables that are rarely studied and will produce new novelties.

Article History:

Received:2/09/2022

Revised:14/09/2022

Accepted: 12/10/2022

Published:24/10/2022

Keyword: *Decentralization, Disability, Inclusive Education, Special Schools*

Abstrak

Tahun 2019, jumlah SLB berada di angka 2.200, sedangkan pendidikan inklusi mengalami peningkatan pesat yang semula 59 ribu sekolah/universitas pada tahun 2019, meningkat menjadi 99 ribu pada tahun 2020, tahun 2021 meningkat kembali menjadi 124.000 sekolah/universitas. Hal tersebut membuktikan adanya bentuk kebijakan mandiri yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dalam mengelola setiap praktik pendidikan atau yang bisa disebut desentralisasi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah SLB di masa sekarang masih perlu dipertahankan dengan adanya peningkatan pada program penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan systematic literature review metode PRISMA untuk mencari artikel yang relevan dengan melakukan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Hasil dalam penelitian ini adalah, SLB sebagai penyedia layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas masih dibutuhkan keberadaannya, karena penyediaan pendidikan inklusif masih terkendala beberapa hambatan yang menyebabkan kurang efektif untuk saat ini bisa berdiri sendiri. Banyak anak penyandang disabilitas yang masih mendominasi dalam memilih pendidikan di SLB daripada di sekolah yang menyediakan layanan inklusif, walaupun pendidikan inklusif peminatnya sudah meningkat. Hal ini membuktikan bawa pendidikan inklusif terus berupaya dalam meningkatkan kualitasnya. Rekomendasi penelitian yang dapat dilakukan di masa depan yaitu dengan menghubungkan variabel desentralisasi serta pendidikan inklusif dengan variabel lain yang jarang diteliti dan akan menghasilkan novelty terbaru.

Kata Kunci: *Desentralisasi, Disabilitas, Pendidikan Inklusif, SLB.*

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu instrumen utama sebagai strategi dalam menghadapi persoalan pendidikan di Indonesia. Desentralisasi pendidikan merupakan bentuk kebijakan mandiri yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dalam mengelola setiap praktik pendidikan. Reformasi desentralisasi melibatkan pemberdayaan dewan sekolah yang terdiri dari guru sekolah, orang tua dan anggota masyarakat. Desentralisasi pendidikan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien, mewujudkan terwujudnya pendidikan yang bermutu, meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional manajemen dan administrasi untuk memutus mata rantai administrasi terpusat yang birokratis dan boros, meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab keuangan serta memperkuat pengawasan daerah (Papadopoulos, 2013). Dengan

mengambil keputusan yang lebih dekat dengan rakyat, desentralisasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan relevansi dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas. Kedua hal ini pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam perbaikan nyata dalam kualitas pendidikan (Winardi, 2017).

Perbaikan kualitas pendidikan tidak terlepas dari pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat (Wardhani & Andika, 2021). Aspirasi terhadap otonomisasi dan desentralisasi pendidikan semakin kuat karena adanya dua kelemahan konseptual dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Pertama, yaitu bentuk kebijakan pendidikan nasional bersifat sentralistik dan kaku (Chairudin, 2019), mengabaikan keberagaman kondisi, ekonomi, dan budaya yang ada pada masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Kedua, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional berorientasi hanya pada pencapaian target-

target tanpa memerhatikan peningkatan proses yang lebih fundamental, yaitu pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh ranah dan potensi anak didik (Amiruddin et al., 2021; Chairudin, 2019). Hal ini didasari oleh *education for all*, yang berarti pendidikan bagi semua orang tanpa memandang latar belakangnya (Kusumawardhana & Bainus, 2018). Sedangkan pada praktiknya, keterjangkauan seringkali menjadi hambatan untuk pemenuhan fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Selain itu, masih banyak kelompok minoritas yang kesulitan dalam mendapatkan atau mengikuti sistem pendidikan yang ada, salah satunya kelompok penyandang disabilitas (Anzari et al., 2018).

Fasilitasi pendidikan bagi penyandang disabilitas telah dirumuskan dalam berbagai penerapan. Peserta didik penyandang disabilitas pada awalnya

dikumpulkan dalam satu sistem pembelajaran khusus pada sekolah luar biasa (SLB). Penyandang disabilitas memilih sekolah pada sekolah luar biasa (SLB) yang terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan hambatan yang dimiliki oleh peserta didik. Misalnya, SLB A ditujukan hanya bagi penyandang tunanetra, SLB B ditujukan hanya bagi disabilitas tunarungu, dan lain-lain. Fasilitas yang disediakan oleh SLB kemudian disesuaikan dengan tujuan sekolah masing-masing (Prayoga et al., 2021). Sekolah khusus ini dibentuk dengan tujuan pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan serta melindungi peserta didik penyandang disabilitas dari pengalaman dikucilkan atau *bullying* oleh masyarakat sekitar (Hastuti, 2022). Belakangan, model pendidikan ini mulai bergeser menjadi sistem pendidikan inklusif (Yuliana, 2020).



Gambar 1. Jumlah SLB dan Pendidikan Inklusif di Indonesia Tahun 2019-2021 (Kemendikbud, 2021; Kemendikbudristek, n.d.; Republika, 2021; Uhamka, 2021)

Kondisi ini digambarkan oleh peningkatan jumlah ketersediaan pendidikan inklusif di Indonesia yang lebih banyak dan bertumbuh pesat secara kuantitasnya dibandingkan dengan jumlah dan pertumbuhan SLB. Sejak tahun 2019, jumlah SLB berkisar pada angka 2.200.

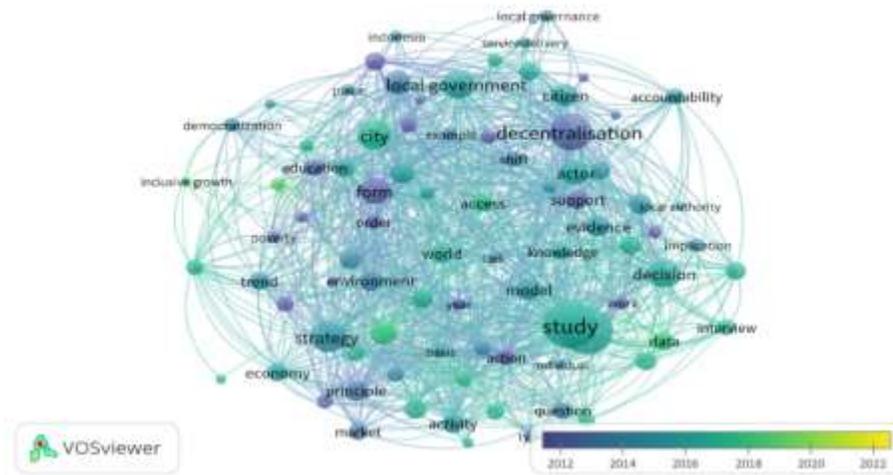
Sebaliknya, pendidikan inklusif mengalami peningkatan yang pesat. Pendidikan inklusif tersedia sebanyak 59 ribu sekolah/universitas pada tahun 2019, meningkat menjadi 99 ribu pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 meningkat

kembali menjadi 124.000 sekolah/universitas.

Masalah apapun yang muncul dari adanya proses penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas di Indonesia secara hukum sudah diatur sejak dulu dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dan dinyatakan bahwa semua sekolah baik tingkat kabupaten maupun provinsi wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Konsekuensi yang harus dilakukan adalah pemerintah pusat serta pemerintah daerah wajib bertanggung jawab untuk penyediaan pendidikan inklusif dengan melakukan kerjasama semua pihak yang melibatkan seluruh tenaga pendidik, siswa, dan orang tua (Efendi, Malang, et al., 2022). Berdasarkan peraturan tersebut, peserta didik penyandang disabilitas yang sebelumnya bersekolah di fasilitas khusus sekolah luar biasa (SLB), mulai diarahkan untuk menjalani pendidikan di sekolah inklusi. Hal ini bertujuan agar peserta didik penyandang disabilitas dapat belajar berdampingan dengan siswa umum dan menjadi bagian aktif dari masyarakat (Wibowo & Muin, 2018). Penelitian ini membahas mengenai pendidikan inklusif dan perannya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan penyandang disabilitas. Peneliti

berusaha mengetahui jika kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas telah terpenuhi dengan adanya pendidikan inklusif, atau jika peserta didik penyandang disabilitas masih membutuhkan fasilitas sekolah luar biasa.

Penelitian tentang desentralisasi khususnya pendidikan inklusif sudah banyak diulas oleh peneliti terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi metode. Peneliti menggunakan metode SLR (*systematic literature review*) dengan teknik PRISMA 2020. SLR merupakan metode untuk menjawab hipotesis penelitian melalui tindakan mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian sesuai dengan kriteria kelayakan yang telah ditentukan (Xiao & Watson, 2019). Metode SLR memungkinkan untuk mengumpulkan berbagai temuan kuantitatif dan kualitatif sekaligus (Mengist et al., 2020). Peneliti mengumpulkan berbagai literatur terkait desentralisasi pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Peneliti menganalisis topik penelitian berdasarkan penggantiannya dari SLB, kebijakan, kesiapan metode pengajaran dan kurikulum, serta persepsi masyarakat. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengetahui kondisi pendidikan inklusif di Indonesia secara dari berbagai sudut pandang.



Gambar 2. Vos Viewer Overlay Visualization Network

Berdasarkan gambar 2 pada hasil *overlay visualization network* tersebut dapat dilihat bahwa penelitian yang berkaitan dengan desentralisasi pendidikan inklusif pada tahun 2020 sampai tahun 2022 berwarna kuning, yang artinya penelitian tersebut masih sedikit dilakukan. Jika diamati lebih lanjut, jarak antara lingkaran variabel “*decentralization*”, dengan variabel “*education*” dan “*inclusive growth*” masih berjejaring sangat jauh, hal ini bisa digunakan sebagai pembuktian kebaruan penulisan variabel kami pada artikel tentang desentralisasi program penyediaan pendidikan inklusif di Indonesia ini.

Peneliti mendalami fakta karena adanya pendidikan inklusif, peserta didik penyandang disabilitas mungkin tidak lagi membutuhkan SLB. Kemudian, peneliti juga berusaha mengetahui efektivitas pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas dan dapat menggantikan SLB. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi alat evaluasi bagi pembuat kebijakan khususnya dalam penyediaan pendidikan inklusif dan akomodasi bagi peserta didik penyandang disabilitas.

2. KAJIAN LITERATUR

Desentralisasi pada dasarnya merupakan sebuah fenomena global (Suwanmala & Weist, 2009). Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan. Desentralisasi pada awalnya bertujuan untuk menyusun kembali pemerintahan, dari mekanisme hierarkis, birokrasi manajemen *top-down* ke sistem pemerintahan mandiri bersarang yang dicirikan oleh partisipasi dan kerjasama (Wardhana, 2019). Ada tiga bentuk utama dan derajat desentralisasi. Yang pertama adalah dekonsentrasi, atau pengalihan tugas dan pekerjaan, tetapi bukan wewenang, kepada unit lain dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah pendelegasian, atau pemindahan wewenang pengambilan keputusan dari unit yang lebih tinggi ke unit yang lebih rendah. Yang ketiga adalah devolusi, atau penyerahan wewenang kepada unit terendah berikutnya sehingga dapat

beroperasi secara independen (Hanson, 1997).

Kajian ini secara khusus berkaitan dengan desentralisasi pendidikan. Bagaimanapun, desentralisasi mencakup berbagai bidang studi, dan salah satu bidang yang paling sulit adalah desentralisasi di bidang pendidikan (Suwanmala & Weist, 2009). Konsep dasar desentralisasi pendidikan menyangkut transfer wewenang dari mereka yang berada di satu lokasi atau tingkat dalam organisasi pendidikan kepada mereka yang berada di tingkat lain (McGinn, 1999). Desentralisasi pendidikan melibatkan pengalihan tanggung jawab pendidikan dan otoritas pengambilan keputusan dari otoritas pusat ke tingkat yang lebih rendah dalam organisasi (Kaewkumkong & Jaiborisudhi, 2021).

Aspek terpenting dari desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan wewenang atas pengeluaran, kepegawaian, dan konten pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah tingkat lokal (Behrman et al., 2002). Proyek desentralisasi pendidikan bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan efisiensi manajemen, mendistribusikan kembali tanggung jawab keuangan, meningkatkan demokratisasi melalui distribusi kekuasaan, menetralkan kekuasaan pusat, dan meningkatkan kualitas pendidikan (Hanson, 1997). Namun dalam perjalanannya, desentralisasi mulai diaplikasikan di bidang lain, seperti pendidikan. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan pemberian layanan dasar dengan mengurangi ketidakhadiran, meningkatkan pengawasan, meningkatkan semangat dan tingkat motivasi para pelaku lokal dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah dalam mengelola

seluruh kepentingan daerah (Kameshwara et al., 2020).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode *systematic literature review* untuk mendapatkan suatu deskripsi atau gambaran yang luas mengenai desentralisasi pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas di Indonesia. Banyak teori sudah menjelaskan tentang cara menggunakan metode *systematic literature review* untuk melakukan suatu analisis tertentu (Page et al., 2021; Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019). Adapun pada penelitian ini, peneliti berusaha memilih dan mengumpulkan data dengan menggunakan model PRISMA. PRISMA merupakan standardisasi dari *systemic literature review* (Selcuk, 2019). Peneliti menggunakan prosedur PRISMA yang digunakan oleh Selcuk (2019). Pada penulisan ini peneliti akan membatasi pencarian artikel hanya pada rentang waktu tahun 2013 sampai 2022 dari basis data google scholar dan Scopus berdasarkan topik penelitian. Selanjutnya tahapan yang dilakukan dalam proses pencarian artikel adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi

Identifikasi artikel didasarkan pada pencarian jurnal yang digunakan yaitu melalui basis data Google Scholar dan Scopus dengan menggunakan kata kunci sebagai basis pencarian. Kata kunci yang dipakai adalah "SLB", "Desentralisasi", "Disabilitas", "Pendidikan Inklusif", "Indonesia". Pencarian dilakukan dengan pembatasan tahun terbit, yaitu dari rentang tahun 2013 sampai 2022. Berdasarkan filter tersebut ditemukan sebanyak 63 artikel dari Google Scholar dan 21 artikel dari Scopus.

2. Skrining (*Screening*)

Screening atau pemilihan data yaitu proses penyaringan terhadap artikel yang paling sesuai dengan topik yang akan diteliti. Terdapat beberapa tahapan *screening* yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi merupakan karakteristik esensial dari populasi yang dituju, dan karakteristik tersebut yang digunakan peneliti untuk menjawab

pertanyaan penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi adalah karakteristik yang memenuhi kriteria inklusi tetapi memiliki sifat tambahan yang dapat menghambat keberhasilan studi atau meningkatkan kemungkinan hasil negatif (Patino & Ferreira, 2018). Kriteria dalam penelitian ditunjukkan sebagai berikut :

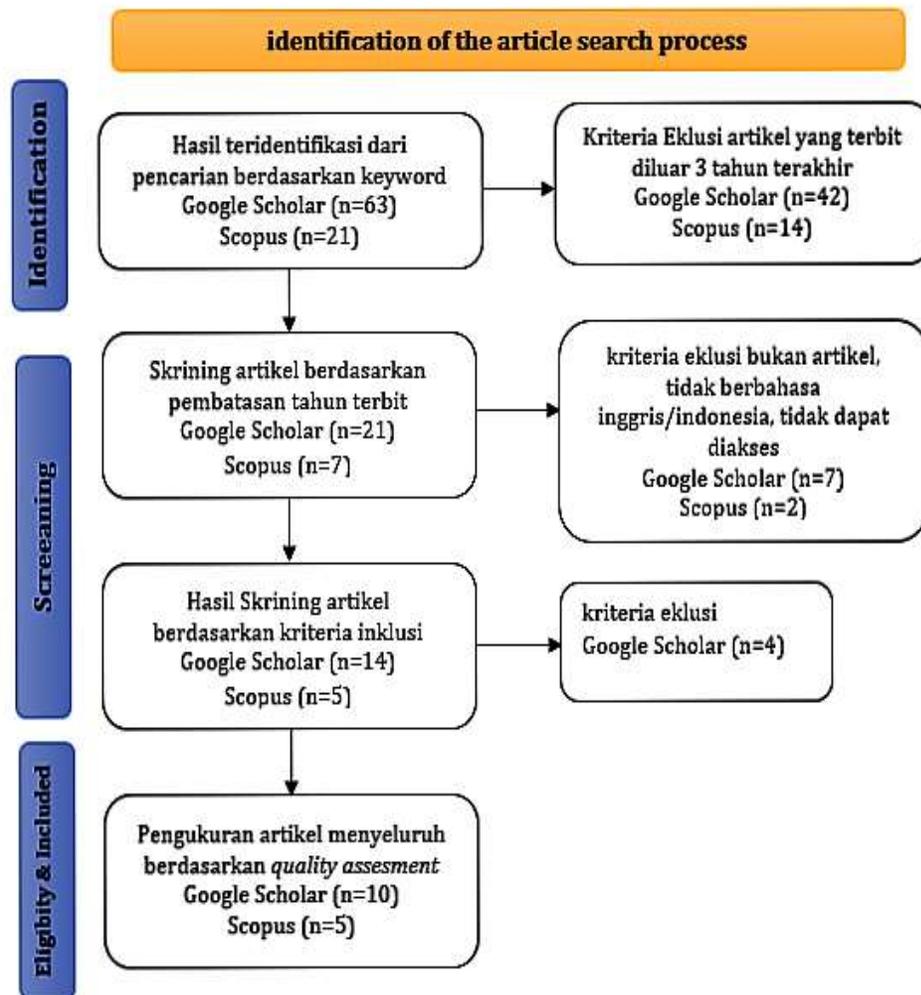
Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Artikel yang terbit dalam 10 tahun terakhir (2013-2022)	Artikel terbit diluar kurun waktu 10 tahun terakhir (terbit diluar tahun 2013-2022)
Tipe dokumen berupa artikel	Tipe dokumen bukan artikel
Artikel berbahasa Inggris (scopus)	Artikel tidak berbahasa Inggris (scopus)
Artikel bisa diakses bebas	Artikel tidak dapat diakses bebas (terbatas/berbayar)

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan pembatasan tahun dengan artikel yang terbit dalam 10 tahun terakhir dihasilkan 14 artikel dari Google Scholar, 5 artikel dari Scopus yang termuat dalam kriteria inklusi, sisanya masuk dalam kriteria eksklusi. Selanjutnya dilakukan ekstraksi lagi dengan melihat keseluruhan isi artikel, apakah artikel sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas topik penelitian.

3. Eligibitas (*Eligibility*)

Eligibility adalah penyesuaian atau pengecekan data dari hasil setelah proses identifikasi dan skrining dengan melakukan kriteria inklusi dan eksklusi untuk melakukan ekstraksi data. Dari proses *eligibility* didapatkan 15 artikel dari basis data Google Scholar dan Scopus berdasarkan penelusuran artikel secara menyeluruh. Dari 15 artikel tersebut semua nya sesuai dengan topik peneliti dan akan di analisis lebih lanjut dalam pembahasan. Proses peninjauan artikel menggunakan *flow chart* yang ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Hasil Pencarian dengan PRISMA

Gambar 3 menunjukkan diagram alir berdasarkan pedoman PRISMA. Peneliti melakukan identifikasi jurnal pada Google Scholar dan Scopus dengan menggunakan kata kunci sebagai basis pencarian. Hasil pencarian sebanyak 63 dokumen di Google Scholar dan sebanyak 21 dokumen di Scopus.

Setelah proses identifikasi selesai, peneliti melanjutkan ke tahap skrining berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Peneliti menggunakan filter tahun 2013-2022 pada masing-masing *database*. Dalam proses ini peneliti berhasil mengumpulkan 21 artikel dari Google Scholar dan 7 artikel dari Scopus yang sesuai dengan kriteria

tahun terbit. Peneliti hanya mengambil jurnal yang berbentuk artikel yang ditandai dengan tanda 'PDF' di sebelah kanan judul dokumen pada Google Scholar. Sedangkan pada *database* Scopus, peneliti menceklis *English* sebagai Bahasa penelitian yang dicari. Hasil artikel yang didapatkan dalam proses ini sebanyak 14 artikel di Google Scholar dan 5 artikel di Scopus. Kemudian, peneliti melakukan pengecekan kelayakan artikel. Kriteria kelayakan dilihat dari judul, abstrak, dan konten secara menyeluruh. Empat artikel dikeluarkan karena tidak sesuai dengan topik penelitian. Peneliti berhasil mengumpulkan 10 artikel dari Google

Scholar dan 5 artikel dari Scopus untuk dianalisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dalam pencarian *literature review* menunjukkan 15 artikel yang akan di analisis dalam pembahasan, dimana artikel ini meliputi seluruh topik yang membahas

tentang desentralisasi pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Temuan ini berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh para penulis sehingga akan menghasilkan analisis mendalam yang disajikan dalam pembahasan penulisan ini.

Tabel 2. Penelitian yang Dianalisis

Judul Artikel	Nama Jurnal	Referensi
Intervensi Sosial Dalam Manajemen Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang	Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (Jdkp) Elssn : 27225259 Volume 02 Nomor 01	(Esperanza & Djumiarti, 2021)
Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Memberikan Layanan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Boyolali	<i>Diponegoro Law Journal</i> Volume 8 Nomor 2	(Kiswara et al., 2019)
Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur	Dih Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28	(Afifah & Hadi, 2018)
Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas	Syiah Kuala Law Journal Volume 2 Number 1	(Anzari et al., 2018)
Manajemen Sekolah Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Di Sekolah K-Link Care Center Jakarta)	Jurnal Pendidikan Islam Tawazun Volume 11 Nomor 2	(Suhartono, 2018)
Empati Terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus: Ditinjau Dari Jenjang Pendidikan Inklusi Dan Jenis Kelamin	Jurnal Psikologi Undip Volume 16 Nomor 1	(Faizah et al., 2017)
Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengembangan Sekolah Luar Biasa (Slb) Di Semarang	<i>Journal Of Politic And Government Studies</i> Volume 6 Nomor 03	(Paristiawan, 2017)
Implementasi Program Opportunities For Vulnerable Children (Ovc) Terhadap Sistem Pendidikan Inklusif Bagi Anak Disabilitas Di Indonesia Oleh Helen Keller International (Hki) Tahun 2010 – 2013	Jom Fisip Volume 3 Nomor 2	(Sari, 2016)
Konsepsi Difabilitas Dan Pendidikan Inklusif	INKLUSI Volume 1 Nomor 1	(Yulianto, 2014)
Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia	Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi Volume 04 Nomor 2	(Sakti, 2020)
Environmental Scanning: In Creating Strategic Planning For The Education Of Persons With Different Ability	<i>Iop Conf. Series: Earth And Environmental Science</i> 328	(Mustika & Rahmayanti, 2019)
Investigating Effectiveness Of Disability Friendly Education Training Modules In Indonesian Schools	<i>International Journal Of Education And Practice</i> 2019 Volume 7 Nomor 3	(Salim et al., 2019)
Inclusive Education For Student With Special Needs At Indonesian Public Schools	<i>International Journal Of Instruction</i> Volume 15 Nomor 2	(Efendi, Malang, et al., 2022)
Indonesian Educators' Knowledge And Beliefs About Teaching Children With Autism	<i>Athens Journal Of Education</i> Volume 7 Issue 1	(Budiyanto et al., 2020)
Indonesian Teachers' Epistemological Beliefs And Inclusive Education	<i>Journal Of Intellectual Disabilities</i> 2019 Volume 23 Nomor 1	(Sheehy et al., 2019)

Tabel 3. Mapping Hasil *Literature Review*



Kategori Bahasan	Sub Kategori	Temuan	Referensi
Program SLB diganti dengan pendidikan inklusif	Ketersediaan Fasilitas	Terkendala fasilitas dan rendahnya pengetahuan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.	(Esperanza & Djumiarti, 2021)
	Tenaga Pengajar	penyediaan tenaga pengajar, aksebilitas, pemerataan program pelatihan bagi difabel masih kurang.	(Kiswara et al., 2019; Sakti, 2020; Salim et al., 2019)
Kebijakan penyediaan program pendidikan inklusif	Implementasi Kebijakan	Perlu perbaikan dalam hal implementasi kebijakan.	(Yulianto, 2014)
	Landasan Hukum	Belum adanya peraturan tentang perlindungan bagi disabilitas yang sesuai undang-undang.	(Afifah & Hadi, 2018)
	Faktor Politik	Ketidaksetaraan bidang politik dan hukum yang mengatur pendidikan inklusif.	(Mustika & Rahmayanti, 2019)
Kesiapan Metode Pengajaran dan Kurikulum	Kurikulum yang Digunakan	penyusunan program pembelajaran berdasarkan kurikulum K-13	(Paristiawan & Taufiq, 2017)
	Kesiapan Kurikulum	Kurikulum dan evaluasi penilaian pembelajaran bagi penyandang disabilitas.	(Suhartono, 2018)
	Implementasi Kurikulum	masih perlu perbaikan bagi kurikulum pengajaran	(Sakti, 2020)
	Akomodasi Penyandang Disabilitas	mengakomodasi gaya belajar yang beragam	(Efendi, Pradipta, et al., 2022)
Persepsi Masyarakat terkait Program Pendidikan Inklusif	Pemahaman masyarakat	masih terbatas tentang pemahaman pentingnya pendidikan inklusif dan hubungan tentang anak perlu didahulukan.	(Budiyanto et al., 2020; Rahmanindita & Djumiarti, 2021; Sari, 2016; Sheehy et al., 2019)
	Penerimaan masyarakat	empati paling rendah dimulai dari jenjang SMP kemudian diikuti perguruan tinggi dan SMA dan SD	(Faizah et al., 2017)
	Implementasi Pendidikan Inklusif	Belum maksimal dalam peningkatan mutu	(Anzari et al., 2018)

Berdasarkan hasil mapping temuan *literature* tersebut, kami menganalisis bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang memegang teguh keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Penerapan keadilan sosial di tengah masyarakat masih memerlukan banyak perbaikan, salah satunya dalam perlakuan terhadap anak penyandang disabilitas. Pemerintah telah meneranak penyandang disabilitas berbagai kebijakan, misalnya dengan mengadakan

pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam proses belajar mengajar di sekolah reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya (Sari, 2016). Konsep dasar dari pendidikan inklusif yaitu menghadirkan anak penyandang disabilitas dalam proses belajar mengajar di lingkungan yang sama dengan anak-anak lainnya, tanpa

mengabaikan kebutuhan khusus dari anak penyandang disabilitas tersebut (Sakti, 2020; Sari, 2016).

Pengadaan pendidikan inklusif ini telah hadir sejak tahun 2002 di Indonesia. Pendidikan inklusif pada awalnya hanya terbatas pada penyandang tuna netra di satu daerah saja. Hal ini karena penyandang disabilitas maupun masyarakat Indonesia masih belum terbiasa hidup berdampingan. Penerapan pendidikan inklusif dikembangkan secara intensif pada tahun 2003 dan diperluas secara nasional pada tahun 2007, termasuk penerapan pendidikan inklusif untuk anak penyandang disabilitas dengan keluhan lainnya (Sari, 2016).

Kekuatan dan Hambatan Pendidikan Inklusif

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih mengalami hambatan di beberapa faktor. Sikap sekolah inklusif terhadap kehadiran anak penyandang disabilitas masih menunjukkan ketidaksiapan, baik dari sisi sarana maupun ketersediaan guru pendamping (Anzari et al., 2018; Esperanza & Djumiarti, 2021). Anak penyandang disabilitas memang memerlukan sarana dan prasarana khusus dalam memenuhi proses belajar mengajar. Anak penyandang disabilitas membutuhkan identifikasi atau *assessment* awal untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan dari anak tersebut agar dapat melakukan pembelajaran tanpa mengalami hambatan berarti. Sebagai contoh, anak tuna netra membutuhkan buku khusus dalam membaca pelajaran di kelas.

Berdasarkan hal tersebut, *assessment* dalam identifikasi kondisi anak penyandang disabilitas merupakan bagian paling penting agar kebutuhan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, sehingga tujuan pengadaan pendidikan inklusif dapat tercapai (Suhartono, 2018). Secara empiris, sekolah regular sudah melakukan rekomendasi agar bisa membentuk pendidikan inklusif dengan melakukan assesment dalam mendesain pembelajaran, pembinaan serta penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang menggambarkan sisi (Efendi, Pradipta, et al., 2022). Namun disisi lain kehadiran Sekolah yang mengadakan pendidikan inklusif tanpa mempersiapkan fasilitas yang mumpuni bagi anak penyandang disabilitas justru akan mengucilkan anak tersebut (Kiswara et al., 2019; Sakti, 2020). Kondisi ini ditunjukkan dengan masih adanya pemisahan kelas untuk pembelajaran khusus atau pengajaran pelajaran yang berbeda meskipun berada di kelas yang sama (Sakti, 2020).

Hambatan tersebut juga terjadi karena pengetahuan mengenai anak penyandang kebutuhan khusus di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih belum memadai, fasilitas sekolah yang tidak memenuhi standar kebutuhan anak penyandang disabilitas (Anzari et al., 2018; Esperanza & Djumiarti, 2021; Sari, 2016). Sehingga, pendidikan anak penyandang disabilitas diserahkan begitu saja kepada guru atau pendamping yang memiliki pemahaman dan pengalaman yang lebih memadai (Paristiawan, 2017) daripada memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas agar

tidak mengalami hambatan dapat belajar dengan nyaman.

Guru pembimbing/pendamping yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola anak penyandang disabilitas juga berjumlah sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang ada (Anzari et al., 2018; Kiswara et al., 2019; Sakti, 2020). Kelas inklusif dalam hal ini membutuhkan kesetaraan, dimana guru diyakini sebagai praktik yang baik, namun terkadang budaya menyebabkan para guru kesulitan untuk mempraktikannya, dan para guru menginginkan adanya pelatihan pengajaran yang praktis dan pengembangan keterampilan secara eksplisit (Budiyanto et al., 2020; Sheehy et al., 2019).

Pendampingan dan pelatihan tersebut menjadi lebih dibutuhkan karena tidak tersedia sarana dan prasarana pendukung anak penyandang disabilitas atau *reasonable accommodation* yang sangat dibutuhkan (Afifah & Hadi, 2018; Anzari et al., 2018; Sakti, 2020). Kurikulum dan aturan sekolah yang ada juga masih kurang akomodatif bagi anak penyandang cacat, (Sakti, 2020).

Kurikulum dan aturan sekolah yang ada juga masih kurang akomodatif bagi anak penyandang cacat, (Sakti, 2020) menyebutkan dalam tulisannya bahwa dalam standar kompetensi, guru harus memahami maksud dari pengungkapan dimana terkadang guru menyampaikan dengan secara verbal yang dinilai masih terlalu sempit. Dari penyampaian yang terlalu sempit itu membuat pelajar dengan jenis disabilitas tunarungu/tunawicara tidak mungkin ikut berpartisipasi karena mereka kesulitan dalam komunikasi.

Keberhasilan pendidikan inklusif dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari lingkungan di sekitar anak penyandang disabilitas yang mengenal dan menerima kehadirannya (Afifah & Hadi, 2018; Faizah et al., 2017; Yulianto, 2014). Hal ini tampaknya masih mengalami jalan berat karena masih banyak orang tua yang memandang anak penyandang disabilitas sebagai orang yang 'asing' dan 'bahaya' bagi anak-anaknya, kemudian mengajarkan perilaku menghindar terhadap anak penyandang disabilitas (Esperanza & Djumiarti, 2021; Faizah et al., 2017). Kondisi ini perlu dimitigasi dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat luas agar lebih mengenal mengenai kondisi anak penyandang disabilitas (Anzari et al., 2018; Yulianto, 2014).

Melalui pendidikan inklusif, sekolah dapat berperan aktif dalam menciptakan dan membangun masyarakat yang inklusif. Pendidikan inklusif menekankan pada perspektif penerimaan terhadap keragaman yang ada dan merangkulnya sebagai nilai penting masyarakat sipil baik di sekolah, profesional, budaya maupun di masyarakat. Pendidikan inklusif tidak hanya menjadi jawaban atas permasalahan di bidang pendidikan, namun dampaknya juga akan menimbulkan efek riak (*ripple-effect*) ke sektor-sektor lain serta sosial kemasyarakatan, ekonomi, budaya, dan politik. Namun dalam praktiknya, pendidikan inklusi masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan ketimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi yang masih belum memenuhi kebutuhan kelompok difabel Indonesia, khususnya anak-anak dengan

kemampuan berbeda (Mustika & Rahmayanti, 2019). Budaya berteman baik dan profesional dalam lingkup pendidikan inklusif dinilai mampu mengubah perilaku *bullying* menjadi ramah terhadap disabilitas, dimana kekuatan intervensi yang telah merubah kelalaian seseorang menjadi positif (Salim et al., 2019).

Desentralisasi pendidikan merupakan bentuk pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada bidang pendidikan, baik dalam hal penentuan kebijakan dan anggaran biaya. Dengan adanya desentralisasi pendidikan, diharapkan terciptanya kebijakan anggaran yang tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan siswa. Namun, desentralisasi pendidikan khususnya bagi anak penyandang disabilitas masih mengalami hambatan. Pemerintah Daerah di beberapa wilayah masih belum merumuskan kebijakan baru dalam rangka perbaikan atau peningkatan fasilitas bagi anak penyandang disabilitas (Afifah & Hadi, 2018). Selain itu, Pemerintah Daerah masih belum maksimal dalam pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan karena mengalami penambahan beban anggaran pembiayaan daerah (Afifah & Hadi, 2018; Anzari et al., 2018).

Penyelenggaraan layanan pendidikan inklusi harus disiapkan berdasarkan aspek-aspek seperti kondisi berbagai anak berkebutuhan khusus (tunarungu, cacat intelektual, tunanetra, berbakat, dan autisme), dan jenjang pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi (Efendi, Pradipta, et al., 2022). Terlepas dari adanya hambatan tersebut, pendidikan inklusif memberikan

kesempatan bagi anak penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari masyarakat, sehingga baik dari anak penyandang disabilitas maupun anak-anak pada umumnya serta masyarakat dapat saling mengenal satu sama lain. Bentuk pendidikan inklusif merupakan langkah awal agar penyandang disabilitas mendapat tempat serta hak yang sama di tengah masyarakat, tanpa mengabaikan kebutuhan khususnya (Anzari et al., 2018; Kiswara et al., 2019).

Pendidikan inklusif bertujuan agar anak penyandang disabilitas dapat berbaur dengan lingkungannya, serta untuk lingkungan umum dapat menerima penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat. Harapannya, anak penyandang disabilitas nantinya akan mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Kiswara et al., 2019). Namun, praktik “kelas dalam kelas” yang terjadi pada lembaga pendidikan inklusif menjadikan pendidikan tersebut tidak efektif dalam mencapai tujuannya (Sakti, 2020; Yulianto, 2014).

Urgensi Pendidikan Inklusif dan SLB

Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai sarana menempuh pendidikan bagi anak penyandang disabilitas tentu saat ini memang masih dibutuhkan, karena penyediaan sekolah inklusif yang belum maksimal menyebabkan pendidikan SLB masih dicari dan dibutuhkan. Sebaiknya ketersediaan pendidikan inklusif dalam sekolah reguler segera dipercepat dan dipersiapkan dengan matang, agar anak-anak penyandang disabilitas bisa merasakan bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman lainnya tanpa ada

rasa perbedaan apapun dalam menjalaninya. SLB saat ini masih perlu dipertahankan sebagai jembatan untuk tetap memfasilitasi mereka yang

berkebutuhan khusus, dan nantinya dapat dijadikan evaluasi dalam persiapan penyediaan pendidikan inklusif.



Gambar 4. Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas di SLB dan Sekolah Inklusi Tahun 2019-2021 (Kemendikbudristek, n.d.; Republika, 2021)

Hingga saat ini, jumlah peserta didik yang bersekolah di sekolah inklusi masih belum sebanyak di SLB. Berdasarkan data mengenai jumlah peserta didik penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan, peserta didik penyandang disabilitas hingga saat ini masih lebih banyak yang bersekolah di SLB. Jumlah peserta didik penyandang disabilitas yang bersekolah di SLB pada tahun 2021 sebanyak 145.065 siswa, sedangkan pada sekolah/universitas inklusif baru sebanyak 35.802. Namun, terdapat peningkatan yang cukup besar pada sekolah inklusif pada tahun tersebut, yaitu sebanyak 18.244 siswa. Artinya, terdapat peningkatan minat peserta didik penyandang disabilitas terhadap sekolah inklusif. Pendidikan

inklusif terus menunjukkan perbaikan dari segi penyediaan fasilitas dan memiliki tujuan ideal bagi seluruh bangsa.

Dalam penelitian yang bertema tentang desentralisasi pendidikan inklusif, saran penulis untuk rekomendasi prospek penelitian yang bisa dilakukan di masa depan oleh peneliti lain adalah dengan melakukan tinjauan menggunakan perangkat *Vos Viewer* dengan mengumpulkan data bibliometrik dan divisualisasikan dengan kategori *co-author* dan *co-occurrence* berdasarkan artikel yang ditemukan pada basis data Scopus (Verma et al., 2021). Dari hasil yang keluar nantinya terlihat kekuatan hubungan dan variabel yang berpotensi untuk diteliti kedepannya.

order, implication, decision, work, data, interview. Hasil *visualisasi network* dari perangkat *Vos Viewer* kemudian disajikan pada gambar 6. Setiap lingkaran yang terbentuk adalah untuk mewakili sebuah *keyword* yang ada dalam artikel. Ukuran dari besar kecilnya lingkaran yang membentuk seperti rantai merupakan jumlah variabel yang memiliki hubungan, dimana semakin besar lingkaran dan semakin banyak garis yang berkaitan maka variabel yang ditemukan juga semakin banyak (Ilhami & Salahudin, 2021). Berdasarkan hasil temuan, koneksi variabel pada prospek penelitian kedepannya dapat menghubungkan antara topik desentralisasi dengan variabel yang bervariasi sesuai dengan yang tertera pada hasil *network visualization*. Namun, terdapat tiga variabel besar yaitu *local government, knowledge, dan accountability*.

5. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan pendidikan inklusif masih memerlukan banyak perbaikan dan SLB masih diperlukan sebagai fasilitas pusat anak penyandang disabilitas. Tujuan pendidikan bagi penyandang disabilitas utamanya adalah agar penyandang disabilitas terdidik yang sudah dewasa dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Sistem SLB hanya memenuhi kemampuan *hard skill* peserta didik, namun peserta didik penyandang disabilitas hanya terbiasa berkumpul dengan kelompok yang sama, tidak terlatih untuk beradaptasi dengan masyarakat secara umum. Di sisi lain, persiapan pendidikan inklusif di Indonesia masih sangat minim, baik dari segi penerapan kebijakan, penyediaan fasilitas & tenaga pendidik, maupun kurikulum. Masyarakat cenderung menghindari anak penyandang disabilitas karena memiliki pemahaman yang minim dalam menyikapi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan transisi pendidikan anak penyandang disabilitas ke sekolah inklusif tidak dilakukan secara mendadak, melainkan melalui proses transisi agar pelaksanaannya dapat maksimal tanpa menimbulkan *shock* dari pihak anak penyandang disabilitas, masyarakat, maupun pemerintah atau lembaga pendidikan sebagai pihak-pihak pembuat kebijakan dan penyedia sarana serta prasarana yang dibutuhkan. Sosialisasi terkait pendidikan inklusif juga diperlukan untuk membentuk kesiapan orang tua siswa dan siswa non-anak penyandang disabilitas di sekolah inklusif agar merasa nyaman untuk berkolaborasi dengan siswa anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas yang merasa diterima di lingkungannya diharapkan akan merasa nyaman dengan aktivitas belajarnya di sekolah inklusif serta beradaptasi dengan lebih baik. Melihat kondisi yang ada, sekolah luar biasa (SLB) masih dapat menjadi pusat penelitian dan pengembangan mengenai pendidikan anak penyandang disabilitas ataupun sebagai fasilitas awal yang mempersiapkan anak penyandang disabilitas dalam mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di sekolah reguler. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel pemerintah daerah, pengetahuan, dan akuntabilitas.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W., & Hadi, S. (2018). HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI JAWA TIMUR. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 14(28), 85-101.
- Amiruddin, A., Rubianti, I., Azmin, N., Nasir, M., & Sandi, A. (2021). Analisis Penerapan Kurikulum 2013 Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19 di SMAN 3 Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala*

- Education*, 7(4), 139-143.
<https://doi.org/10.36312/jime.v7i4.2398>
- Anzari, M., Sarong, A. H., & Rasyid, M. N. (2018). HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN INKLUSIF TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS FULFILLMENT OF THE RIGHT TO EDUCATION AGAINST THE DISABILITIES THROUGH INCLUSIVE EDUCATION. *Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh*, 2(1), 23111.
- Behrman, J. R., Deolalikar, A. B., & Soon, L. Y. (2002). Conceptual issues in the role of education decentralization in promoting effective schooling in Asian Developing Countries. *ERD Working Paper Series*, 22, 1-43.
- Budiyanto, B., Sheehy, K., Kaye, H., & Rofiah, K. (2020). Indonesian educators' knowledge and beliefs about teaching children with autism. *Athens Journal of Education*, 7(1), 77-98.
<https://doi.org/10.30958/aje.7-1-4>
- Chairudin, M. (2019). Otonomi dan Kebijakan Anggaran Pendidikan Pasca Reformasi. *AnCoMS: Annual Conference for Muslim Scholars*, 504-509.
- Eck, N. J. Van, & Waltman, L. (2016). Text Mining and Visualization. *Text Mining and Visualization*, 1-5.
<https://doi.org/10.1201/b19007>
- Efendi, M., Malang, U. N., Pradipta, R. F., Malang, U. N., Dewantoro, D. A., Malang, U. N., Ummah, U. S., Malang, U. N., Ediyanto, E., Malang, U. N., Hanafi, M., & Yasin, M. (2022). Inclusive Education for Student with Special Needs at Indonesian Public Schools. *International Journal of Instruction*, 15(2), 967-980.
- Efendi, M., Pradipta, R. F., Dewantoro, D. A., Ummah, U. S., Ediyanto, E., & Yasin, M. H. M. (2022). Inclusive Education for Student with Special Needs at Indonesian Public Schools. *International Journal of Instruction*, 15(2), 967-980.
<https://doi.org/10.29333/iji.2022.15253a>
- Esperanza, T. R., & Djumiarti, T. (2021). Intervensi Sosial dalam Manajemen Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 159-168.
<https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2387>
- Faizah, Kurniawati, Y., & Rahma, U. (2017). EMPATI TERHADAP SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS: DITINJAU DARI JENJANG PENDIDIKAN INKLUSI DAN JENIS KELAMIN. *Jurnal Psikologi Undip*, 16(1), 1-7.
- Hanson, E. M. (1997). Educational Decentralization: Issues and Challenges. *Hemisphere*, 9.
- Hastuti, E. D. (2022). MANAJEMEN TAMAN TERINDAH (KAJIAN ALTERNATIF PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KHUSUS). *Jurnal Exponential*, 3(1), 300-309.
- Ilhami, M. R., & Salahudin, S. (2021). Hubungan antara pembangunan berkelanjutan dengan community based tourism: a systematic literature review. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 100-120.
<https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.5755>
- Kaewkumkong, A., & Jaiborisudhi, W. (2021). Educational decentralization policies in thailand and south korea: A comparative study. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 42(1), 165-170.
<https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.1.26>

- Kameshwara, K. K., Sandoval-Hernandez, A., Shields, R., & Dhanda, K. R. (2020). A false promise? Decentralization in education systems across the globe. *International Journal of Educational Research*, 104. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101669>
- Kemendikbud. (2021). *STATISTIK SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) 2020/2021*.
- Kemendikbudristek. (n.d.). *Data Pokok Pendidikan: Progres Pengiriman SLB*. <https://Dapo.Kemdikbud.Go.Id/Progres-Slb>.
- Kiswara, S. A., Hananto, U. D., & Soemarmi, A. (2019). IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM MEMBERIKAN LAYANAN PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOYOLALI. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 8(2), 1506–1522.
- Kusumawardhana, I., & Bainus, A. (2018). A Coxian Approach: Mengungkap Hegemoni Agenda “Education For All” Terhadap Negara Berkembang. *Jurnal Global Strategis*, 12(2), 53. <https://doi.org/10.20473/jgs.12.2.2018.53-68>
- Mcginn, N. (1999). Decentralization of education: why, when, what and how? Satisfaction and Quality View project Dropouts View project. *International Institute for Educational Planning*, 07, 98. <https://www.researchgate.net/publication/44824547>
- Mengist, W., Soromessa, T., & Legese, G. (2020). Method for conducting systematic literature review and meta-analysis for environmental science research. *MethodsX*, 7, 100777. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.100777>
- Mustika, R. D., & Rahmayanti, K. P. (2019). Environmental Scanning: In Creating Strategic Planning for the Education of Persons with Different Ability. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 328(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/328/1/012051>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. In *The BMJ* (Vol. 372). BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Papadopoulou, V. (2013). Rethinking Decentralization in Education in terms of Administrative Problems. *Educational Process: International Journal*, 2(1-2), 7–18. <https://doi.org/10.12973/edupij.2013.2.12.1>
- Paristiawan, M. F. (2017). *THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE OF CENTRAL JAVA PROVINCE IN THE DEVELOPMENT OF SPECIAL SCHOOLS (SLB) IN SEMARANG*.
- Paristiawan, M. F., & Taufiq, A. (2017). Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam Pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Semarang. *Journal of Politic and* <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16744>
- Patino, C. M., & Ferreira, J. C. (2018).

- Inclusion and exclusion criteria in research studies: definitions and why they matter. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, 44(2), 84–84. <https://doi.org/10.1590/s1806-37562018000000088>
- Prayoga, D. N. R. I., Putra, I. N. G. M., & Prabawa, M. S. (2021). *Perencanaan dan Perancangan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Buleleng*. 9(2), 371–378. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/undagi/index>
- Rahmanindita, T., & Djumiarti, T. (2021). Intervensi Sosial dalam Manajemen Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. *JDKP Jurnal Desentralisasi* <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/2387>
- Republika. (2021). *Jumlah Siswa Inklusi Belum Meningkatkan Signifikan*. <https://www.Republika.Co.Id/Berita/Qqhbma284/Jumlah-Siswa-Inklusi-Belum-Meningkat-Signifikan>.
- Sakti, S. A. (2020). Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia. *Jurnal Golden Age*, 4(02), 238–249. <https://doi.org/10.29408/jga.v4i02.2019>
- Salim, A., Hidayatullah, M. F., Nugraheni, P. P., & Dian Atnantomi, W. (2019). Investigating effectiveness of disability friendly education training modules in Indonesian schools. *International Journal of Education and Practice*, 7(3), 286–293. <https://doi.org/10.18488/journal.61.2019.73.286.293>
- Sari, R. K. (2016). IMPLEMENTASI PROGRAM OPPORTUNITIES FOR VULNERABLE CHILDREN (OVC) TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK DISABILITAS DI INDONESIA OLEH HELEN KELLER INTERNATIONAL (HKI) TAHUN 2010 –2013. *JOM FISIP*, 3(2), 1–21.
- Selcuk, A. A. (2019). A Guide for Systematic Reviews: PRISMA. *Turkish Archives of Otorhinolaryngology*, 57(1), 57–58. <https://doi.org/10.5152/tao.2019.4058>
- Sheehy, K., Budiyanto, Kaye, H., & Rofiah, K. (2019). Indonesian teachers' epistemological beliefs and inclusive education. *Journal of Intellectual Disabilities*, 23(1), 39–56. <https://doi.org/10.1177/1744629517717613>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suhartono, T. (2018). *MANAJEMEN SEKOLAH UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI DI SEKOLAH K-LINK CARE CENTER JAKARTA)* (Vol. 11, Issue 2).
- Suwanmala, C., & Weist, D. (2009). *Thailand's Decentralization_ Progress and Prospects _ Decentralization Policies in Asian Development*.
- Uhamka. (2021). *Kemdikbudristek Ubah Stigma Disabilitas Lewat Sekolah Inklusif*. <https://Gema.Uhamka.Ac.Id/2021/08/25/Kemdikbudristek-Ubah-Stigma-Disabilitas-Lewat-Sekolah-Inklusif/>.
- Verma, R., Lobos-Ossandón, V., Merigó, J. M., Cancino, C., & Sienz, J. (2021). Forty years of applied mathematical modelling: A bibliometric study. *Applied Mathematical Modelling*, 89, 1177–1197. <https://doi.org/10.1016/j.apm.2020.7.004>

- Wardhana, D. (2019). Decentralization, Democratization, And Social Protection In Indonesia: A Systematic Review of the Literature. In *The Indonesian Journal of Development Planning: Vol. III* (Issue 2).
- Wardhani, N. W., & Andika, M. F. F. (2021). Inclusive Education and Social Justice for All Indonesians. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 619, 135–139.
- Wibowo, S. B., & Muin, J. A. (2018). Inclusive Education in Indonesia: Equality Education Access for Disabilities. *KnE Social Sciences*, 3(5), 484. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i5.2351>
- Winardi, W. (2017). Decentralization of Education in Indonesia – A Study on Education Development Gaps in the Provincial Areas. *International Education Studies*, 10(7), 79. <https://doi.org/10.5539/ies.v10n7p79>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Yuliana. (2020). PERAN PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM MEMBANGUN KARAKTER GRIT DAN KEISLAMAN PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2(2), 98–102. <https://doi.org/10.18592/muasharah.v17i1.3002>
- Yulianto, M. J. (2014). Konsepsi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. *Inklusi*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.14421/ijds.010102>

